



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI AMBON

Jln. Dr. Malaihollo, No.1, Telp.(0911) 314341, 343236, Fax.(0911)311102

Website : www.pt-ambon.go.id, e-mail : pt_ambon@yahoo.co.id

A M B O N - M A L U K U - 9 7 1 1 7

Nomor : 2855 /KPT. W27-U/OT1.6/IX/2023

Ambon, 5 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : **Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja**

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU

Di -

T E M P A T.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dimaksudkan untuk:
 - a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu memperoleh nilai sebesar **77** atau **BB (Sangat Baik)**
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen / Sub Komponen Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	20,10	21,60
2	Pengukuran Kinerja	21,60	23,40
3	Pelaporan Kinerja	12,00	13,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	18,50



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI AMBON

Jln. Dr. Malaihollo, No.1, Telp.(0911) 314341, 343236, Fax.(0911)311102
Website : www.pt-ambon.go.id, e-mail : pt_ambon@yahoo.co.id
A M B O N - M A L U K U - 9 7 1 1 7

Nilai Akuntabilitas Kinerja	71,20	77
	Predikat	BB (Sangat Baik)

No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Belum terdapat dokumen PKT tahun 2022 sebagai perencanaan kinerja jangka pendek
2.	Belum terdapat Dokumen Program Kerja Tahun 2022 yang menggambarkan perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja
3.	Belum terdapat publikasi Cetak Biru Mahkamah Agung pada Website
4.	Belum terdapat Dokumen PKT, RKT tahun 2022 yang menggambarkan Perencanaan Kinerja telah sesuai dengan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai
5.	Belum terdapat Analisa terhadap Perjanjian Kinerja digambarkan dengan Pohon Kinerja (Cascading)
6.	Belum terdapat dokumen IKU Tahun 2022
7.	Belum terdapat dokumen matriks pendanaan yang menggambarkan Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai
8.	Belum terdapat Dokumen rapat berjenjang kesekretariatan dan kepaniteraan yang menggambarkan Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Belum terdapat dokumen SK KPN tentang penetapan pemberlakuan SOP yang menggambarkan Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
2.	Belum terdapat dokumen Reviu SOP yang menggambarkan Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja
C. Pelaporan Kinerja	
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Belum terdapat dokumen Capture aplikasi e- SAKIP tahun 2022 yang menggambarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)
2.	Belum terdapat dokumen tindaklanjut LHE tahun 2021 yang menggambarkan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Agar dibuat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang dilaksanakan secara berkala
2.	Agar dibuat Dokumen dalam Perencanaan Kinerja kegiatan/subkegiatan yang saling berhubungan dengan Bagian/unit lainnya) harus ada pola koordinasi (aktivitas kegiatan/pendanaan)
3.	Agar dibuat Perencanaan Kinerja menggambarkan pohon kinerja (bagi habis berjenjang) untuk mencapai tujuan organisasi (proses bisnis)
4.	PK sesuai RKA/DIPA sehingga setiap Tusi/kegiatan tersedia anggarannya



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI AMBON

Jln. Dr. Malaihollo, No.1, Telp.(0911) 314341, 343236, Fax.(0911)311102
Website : www.pt-ambon.go.id, e-mail : pt_ambon@yahoo.co.id
A M B O N - M A L U K U - 9 7 1 1 7

5.	Agar dibuat dokumen laporan kinerja unit secara periodik hingga mencapai hasil (sesuai PK)
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Agar dibuat dokumen SK SOP Pengumpulan data Kinerja
2.	Agar dibuat Hasil pengukuran kinerja yang lalu menjadi dasar menentukan strategi dan me-reviu kebijakan dalam pencapaian kinerja berjalan
C. Pelaporan Kinerja	
D. Evaluasi Kinerja	
1.	Agar dibuat Dokumen yang memuat informasi upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil Monev Triwulan sehingga di akhir tahun Target Tercapai

Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu tahun 2023 dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Pengadilan Tinggi Ambon paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

✍ **KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON**


ADE KOMARUDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I.;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.;
4. Kementerian PAN dan RB